

Peran *Gender gap* Memoderasi Rasio Ketergantungan, PDRB, Belanja Publik Terhadap IPM Jawa Tengah 2016-2020

Wilajeng Herbilta Anugerah Caesaktiti¹✉, ²Rusdarti, ³Shanty Oktavilia

¹SMP Negeri 7 Semarang

^{2,3}Universitas Negeri Semarang

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/beaj.v1i2.33591>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio angka ketergantungan terhadap IPM, pengaruh PDRB terhadap IPM, pengaruh belanja publik terhadap IPM, serta menganalisis peran gender gap dalam memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik terhadap IPM. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan model regresi data panel dan MRA. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data IPM, data rasio ketergantungan, data PDRB data laporan keuangan dan data IPG tahun 2016-2020 seluruh kabupaten/kota sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio angka ketergantungan memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. PDRB dan Belanja publik memiliki pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Gender gap tidak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik terhadap IPM.

Kata Kunci : IPM, Rasio Ketergantungan, PDRB, Belanja Publik, *Gender gap*

✉ Corresponding author :

E-mail: wilajeng@students.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

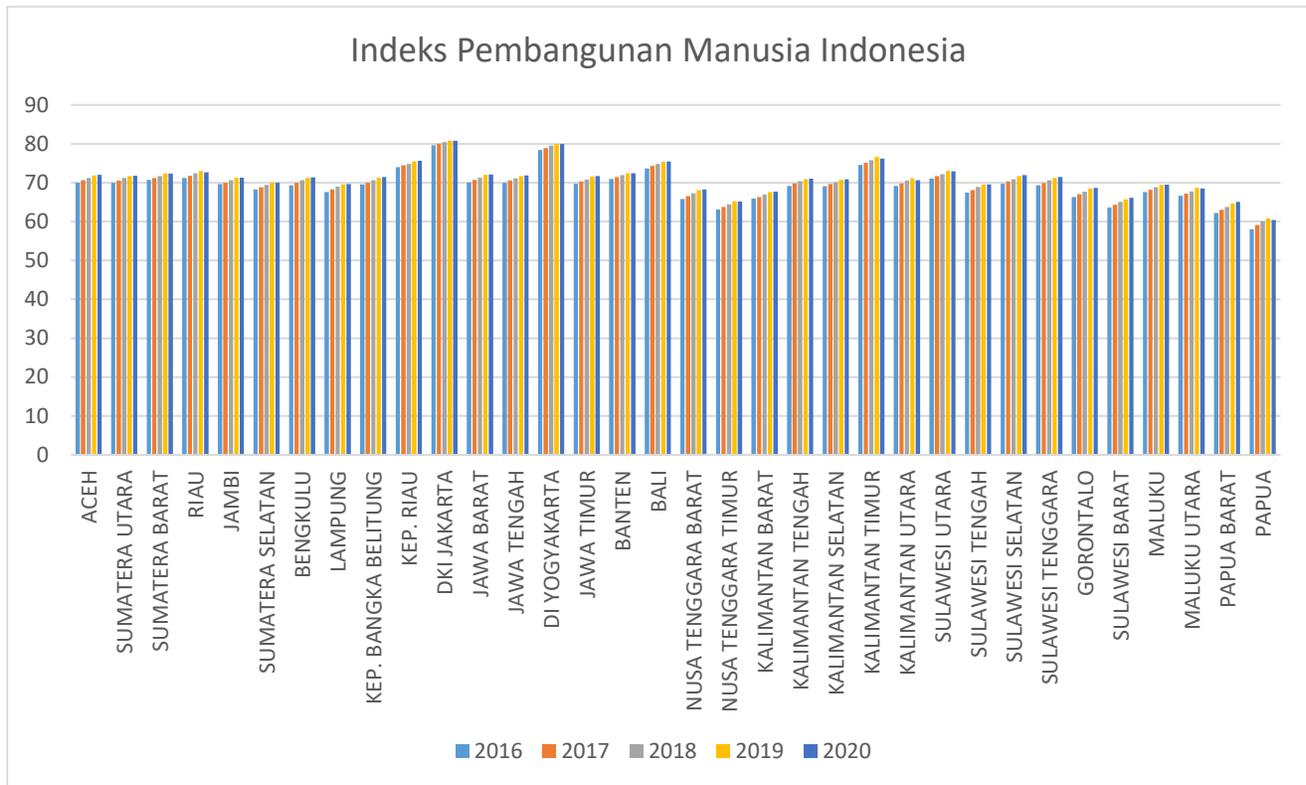
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat kompleks yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa. Salah satu tujuan bangsa dalam pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kualitas pembangunan manusia yang ada pada daerah tersebut. Pembangunan sumber daya manusia sangatlah penting bagi kemajuan suatu negara, dikarenakan sumber daya manusia merupakan suatu aset atau modal negara. Pada generasi kedua, teori pembangunan banyak menekankan pada akumulasi modal sumber daya manusia dengan menciptakan agen-agen pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan peningkatan keterampilan, (Meier dan Stiglitz dalam Kuncoro, 2010).

Kualitas sumber daya manusia di suatu negara tentunya berbeda-beda. Untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Muliza (2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Menurut *United Nations Development Programme* (2020) dalam publikasi *Human Development Report* (HDR) tahun 2020, nilai IPM Indonesia pada tahun 2019 sebesar 0.718 dan berada pada peringkat 107 dunia. Nilai IPM Indonesia masuk dalam kategori High Human Development atau dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi dan

secara global. Selama kurun waktu 4 periode yaitu dari tahun 2016-2020 nilai IPM Indonesia terus mengalami peningkatan.

Setiap daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Indonesia memiliki nilai IPM yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari BPS Indonesia, setiap wilayah provinsi yang ada di Indonesia memiliki perkembangan pembangunan manusia yang beragam. Tidak selalu nilai IPM di Kabupaten/ Kota di pulau Jawa memiliki nilai IPM yang tinggi. Menurut data BPS Indonesia (2021) nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah cukup rendah bila dibandingkan dengan Provinsi diluar Pulau Jawa yaitu seperti Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Aceh dan juga Sumatera Utara. Berikut grafik 1 mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020.

Rendahnya nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah, tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya dari sisi demografi atau dari sisi penduduknya. Menurut Arisman (2018) jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia. Jumlah penduduk juga akan mempengaruhi kualitas hidup yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Zgheib et al (2006) berpendapat bahwa masalah penduduk bukan sekedar masalah angka, tetapi juga menyangkut kualitas hidup atau kesejahteraan manusia dan juga materi. Ginting (2020) juga menyatakan bahwa komposisi penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.



Sumber: BPS Indonesia, 2021 (data diolah)

Grafik 1. (IPM) Menurut Provinsi Tahun 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan keterkaitan dengan pembangunan manusia. Menurut Oktavilia, et al (2018) menyatakan bahwa bahwa pertumbuhan ekonomi secara positif mempengaruhi kualitas manusia. Elistia dan Barlia (2018) juga menyatakan bahwa pembangunan manusia di suatu negara memiliki keterkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pendapatan per kapita (GDP per kapita) yang dapat menjadi indikator kesejahteraan di negara tersebut. Badan Pusat Statistika (2021) juga menjelaskan bahwa PDRB harga konstan dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasio angka ketergantungan dan PDRB, IPM juga dipengaruhi oleh belanja publik. Edeme, et al (2017) berpendapat bahwa sejak ditemukannya

paradigma pembangunan baru yang menghubungkan pertumbuhan dengan peningkatan kualitas hidup, pengeluaran publik di beberapa sektor ekonomi menjadi semakin penting dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengeluaran publik mempengaruhi pembangunan manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dari Pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan (Baeti, 2013).

Adanya kebijakan otonomi daerah juga dimaksudkan agar Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Rusdarti dan Lesta (2013) diharapkan dengan otonomi daerah maka upaya percepatan pembangunan ekonomi atas

dasar inisiatif lokal dapat diwujudkan guna mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Adanya *research gap* dalam penelitian ini, maka dimunculkan variabel moderating yaitu *gender gap*. Variabel *gender gap* digunakan untuk memoderasi variabel rasio angka ketergantungan, PDRB dan belanja publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik terhadap IPM, serta menganalisis peran *Gender gap* dalam memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB dan belanja publik terhadap IPM. Orisinalitas dalam penelitian yaitu menghadirkan variabel *Gender gap* sebagai variabel moderating untuk memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik terhadap IPM.

Penelitian ini berlandaskan pada teori Pertumbuhan Baru (NGT) atau teori pertumbuhan endogen. Menurut Romer (1986) dan Lucas (1988) menjelaskan mengenai *new growth theory* atau *endogenous growth theory* yang muncul karena adanya ketidakpuasan dengan model neo-klasik yang tidak cukup menjelaskan mengenai pertumbuhan jangka panjang (*long-run growth*).

Menurut Kuncoro (2010: 48) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap bahwa pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Perbedaan utama antara model pertumbuhan endogen dengan model neo-klasik terletak pada asumsi bahwa investasi pemerintah dan swasta dalam human capital menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang

menolak kecenderungan *diminishing retrun*. Teori pertumbuhan endogen merupakan mencoba menjelaskan adanya skala hasil yang meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang antarnegara.

Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada hasil yang menurun (*diminishing retrun*) atas kapital dalam formula tersebut. Sehingga, kemungkinan yang dapat terjadi adalah investasi dalam modal manusia dan fisik dapat menghasilkan penghematan eksternal dan peningkatan produktivitas yang melebihi penghasilan yang cukup untuk menutup *diminishing retruns*.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data laporan keuangan, data IPM tahun 2016-2020 pada seluruh kabupaten/kota sampel penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dari Biro Pusat Statistik Indonesia, Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data gabungan yaitu gabungan data time series (antar waktu) dan cross section (antar daerah kabupaten/kota). Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran
IPM	Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (UNDP, 1990).	skala rasio (1-100)
Rasio angka ketergantungan	Rasio angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja) (BPS, 2021).	persen(%)
PDRB	Produk Domestik Bruto menurut harga konstan dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (BPS, 2021).	triliun rupiah
Belanja Publik	Belanja publik terdiri dari 3 bagian yaitu belanja publik secara agregat dan lingkungan kelembagaan, belanja publik untuk modal manusia, dan belanja publik untuk infrastruktur (World Bank, 2020).	triliun rupiah
Gender gap	ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (BPMPK, 2020). <i>Gender gap</i> diukur dengan IPG.	skala rasio (1-100)

Sumber: Berbagai referensi diolah, 2021

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Dengan demikian, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 Z_{4it} + \beta_5 Z_{4it} * X_{1it} + \beta_6 Z_{4it} * X_{2it} + \beta_7 Z_{4it} * X_{3it} + \mu_{it} \quad (1)$$

Y	: IPM (rasio)
$\beta_0, \beta_{1234567}$: koefisien
X ₁	: rasio ketergantungan (persen)
X ₂	: PDRB (triliun)
X ₃	: belanja publik (triliun)
Z	: <i>gender gap</i> (rasio)
μ	: error term
i	: cross section
t	: periode

Keterangan:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan terkait dengan pengujian pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didapat bahwa *fixed effect model* adalah model terbaik untuk penelitian ini. Adapun persamaan *fixed effect model* yaitu:

$$\begin{aligned} IPM_{it} = & 71.42110 - 0.118305 RAK_{it} + \\ & 1.480620 PDRB_{it} + 1.15704 \\ & BELANJAPUBLIK_{it} - 0.00603 \\ & IPG_{it} + 0.000486 M1_{it} - 0.00095 \\ & M2_{it} - 0.004213M3_{it} + \mu_{it} \quad (2) \end{aligned}$$

Hasil pengujian dengan *fixed effect model* di peroleh nilai konstanta sebesar 71.42110, hal tersebut berarti bahwa apabila variabel independen dianggap konstan atau nol, maka besarnya nilai IPM di Kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.42110. Dapat disimpulkan bahwa apabila rasio angka ketergantungan, PDRB, belanja publik dan interaksi variabel moderasi dianggap konstan atau nol, maka nilai IPM meningkat sebesar 71.42.

Berdasarkan hasil uji-t bahwa variabel rasio angka ketergantungan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar -0.118305 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0461. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel rasio angka ketergantungan (RAK) mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.118305 dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhairoh (2018) penelitian tersebut menyatakan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan

manusia. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni dan Tony (2021), Sidabutar et al (2020), Pramono (2016), Bhakti (2014), Pratowo (2012).

Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sidabutar et al (2020) yang menyatakan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adanya perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat menyebabkan pada peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan membawa dampak negatif yang dapat dianggap sebagai penghambat dan juga dampak positif yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam pembangunan.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dapat berpengaruh pada nilai rasio angka ketergantungan. Semakin tinggi rasio angka ketergantungan akan menjadi penghambat bagi pembangunan, sebaliknya apabila nilai rasio angka ketergantungan semakin rendah maka akan membawa manfaat bagi pembangunan. Menurut Aviyati dan Susilo (2016) bahwa rasio ketergantungan yang rendah memberikan manfaat pada pembangunan nasional apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Agar memberikan manfaat lebih bagi pembangunan, maka dari itu perlu diimbangi dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama pembangunan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM (Zuhairoh, 2018).

Berdasarkan hasil estimasi didapat bahwa variabel PDRB signifikan dan berpengaruh

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar 1.480620 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PDRB mengalami peningkatan sebesar 1 triliun rupiah maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1.480620 dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru (NGT) atau teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) yang menyatakan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang Anam et al (2021) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariwuni (2019), Diba (2018), Muliza (2017), Fahmi dan Khairul (2018) dan Mirza (2011).

Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nenik (2021) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM. Begitu pula dengan penelitian Pramono (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Berdasarkan hasil estimasi uji-t didapat variabel belanja publik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) pada taraf signifikansi sebesar 5% dengan nilai *coefficient* sebesar 1.157049 dan dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,0139. Hal ini menunjukkan apabila belanja publik mengalami peningkatan sebesar 1 triliun rupiah maka akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1.157049 dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru (NGT) atau teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menyatakan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Investasi di modal fisik yang dimaksud adalah seperti kesehatan sedangkan modal manusia yang dimaksud yaitu seperti pendidikan, keterampilan. Maka kesehatan dan pendidikan merupakan investasi yang dapat membantu dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariwuni (2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu IPM. Pramono (2016) juga menyatakan pengeluaran pemerintah daerah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjunadhi dan Farida (2020) yang menyatakan bahwa belanja pendidikan berpengaruh signifikan.

Berbeda dengan Muliza (2017) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di

sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Harjunadhi dan Farida (2020) juga menyatakan bahwa belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan. Begitu pula dengan penelitian Ningrum et al (2020) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak signifikan.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan variabel *gender gap* (IPG) merupakan variabel homologiser moderasi karena variabel moderasi tidak signifikan dan variabel interaksi yang tidak juga signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel *gender gap* dapat memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia akan tetapi tidak memoderasi secara signifikan.

Variabel *gender gap* yang dinilai dengan menggunakan IPG tidak mampu untuk mempengaruhi hubungan rasio angka ketergantungan dan IPM. Semakin menurunnya rasio angka ketergantungan, walaupun di dukung dengan adanya ketimpangan gender yang rendah maka nilai IPM akan tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan IPG dan IPM memiliki keterkaitan, karena IPG merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2016) yang menyatakan bahwa rasio (IPG/ IPM) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif, hal tersebut berarti bahwa semakin tingginya rasio (IPG/ IPM) maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa terdapat empat mekanisme dampak demografi terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah

tingkat fertilitas yang rendah mengurangi angka beban ketergantungan dalam angkatan kerja (*dependency ratio*) sehingga meningkatkan suplai tabungan.

Berdasarkan hasil uji moderasi menunjukkan variabel *gender gap* (IPG) merupakan variabel homologiser moderasi karena variabel moderasi signifikan sedangkan variabel interaksi yang tidak signifikan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sesuai dengan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender gap* tidak memoderasi pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Seperti halnya peran *gender gap* pada rasio angka ketergantungan, peran *gender gap* pada hubungan PDRB dan IPM juga tidak mampu untuk mempengaruhi. Semakin meningkatnya PDRB, walaupun di dukung dengan adanya ketimpangan gender yang rendah maka nilai IPM akan tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan IPG dan juga IPM memiliki keterkaitan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2016) menyatakan bahwa rasio (IPG/IPM) memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah positif, hal tersebut berarti bahwa semakin tingginya rasio (IPG/IPM) maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong keberhasilan dari peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki saja tetapi juga didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan.

Berdasarkan hasil dari uji moderasi menunjukkan bahwa variabel *gender gap* (IPG) merupakan variabel homologiser moderasi karena variabel moderasi signifikan sedangkan variabel interaksi yang tidak signifikan. Maka

dari itu dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sesuai dengan hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender gap* tidak memoderasi pengaruh belanja publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tidak hanya *gender gap* yang dianggap tidak mampu untuk mempengaruhi pengaruh rasio angka ketergantungan, PDRB terhadap IPM. *Gender gap* juga tidak mampu untuk mempengaruhi pengaruh belanja publik terhadap IPM. Semakin meningkatnya belanja publik baik dibidang kesehatan dan bidang pendidikan, walaupun di dukung dengan adanya ketimpangan gender yang rendah maka nilai IPM akan tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara IPG dan juga IPM. IPG merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan IPM. IPG dianalisis dengan menggunakan ratio IPM menurut jenis kelamin. Sehingga IPG dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan.

Menurut Sitorus (2016) Rasio (IPG/IPM) menggambarkan gap dalam capaian kapabilitas dasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio (IPG/IPM). Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2016) juga menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan teori pertumbuhan endogen yang menyatakan bahwa modal manusia sebagai sumber pertumbuhan yang terpenting. Modal manusia tidak hanya pendidikan, akan tetapi juga kesehatan, keterampilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diketahui beberapa kesimpulan: 1) Rasio angka ketergantungan memiliki pengaruh yang signifikan sebesar -0.856763 dan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah; 2) PDRB memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0.192174 dan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah; 3) Belanja Publik memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 0.679609 dan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah; 4) Gender Gap tidak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh rasio angka ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5) Gender Gap tidak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 6) Gender Gap tidak terbukti secara signifikan memoderasi pengaruh belanja publik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini. Pertama adalah hanya meneliti IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian, karena semakin banyak yang diteliti maka dapat hasil yang didapat akan lebih akurat. Kedua adalah masih adanya variabel yang tidak berpengaruh terhadap IPM. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel, yaitu terkait variabel moderasi. Ketiga, penelitian ini hanya meneliti pengaruh belanja publik bidang kesehatan dan pendidikan. Maka diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat menambah belanja publik bidang infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. S., Yuni Inawati., & Rina Rosia. (2021). "Factors Affecting The Human Development Index (HDI) In Central Java Province". *Jurnal REP*. 6(1): 12-22. DOI:10.31002/rep.v6i1.3653.
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Signifikan:Jurnal Ilmu Ekonomi*. 7(1), 113-122.
- Ariwuni, Made Ade Dwi., & I Nengah Kartika. (2019). Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 8(12), 2927-2958.
- Aviyati, S., & Susilo. (2016). Analisis Pengaruh Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 120-128.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2015-2020*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2021). *PDRB*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistika Indonesia. (2021). *Rasio Ketergantungan*. Jakarta: BPS Indonesia.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*. 2(3), 85-98.
- Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Bentuk Ketimpangan Gender*. Semarang: Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bhakti, N. A., Istiqomah., & Suprpto. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 18(4), 452-469.
- Diba, A. O. F., Moehammad, F., & Rafael, P. S. (2018). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*. 2(1), 10-19.
- Edeme, R. K., Chigozie, N. N., & Innocent, A. I. (2017). Distributional Impact of Public Expenditure on Human Development In Nigeria". *International Journal of Social Economics*. 44(12), 1683-1693.
- Elistia., & Barlia, A. S. (2018). The Correlation of The Human Development Index (HDI) Toward Economic Growth (GDP Per Capita) In 10 ASEAN Member Countries. *Journal Of Humanities And Social Studies*. 2(2), 40-46.
- Fahmi, A., & Khairul, A. D. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan Dan PDRB Perkapita terhadap IPM. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 2(1), 23-34.
- Ginting, C. K. (2020). Indexing Population Composition to Analyse Population Dynamics Impacts on The Welfare of People In Indonesia. *International Journal of Economic and Business Applied*. 1(2), 218-230.
- Handayani, S., & Nenik, W. (2021). Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran Dan

- Belanja Modal Terhadap IPM Di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah Tahun 2011-2019. *BISECER*. 4(2), 17-26.
- Harjunadhi, J. T., & Farida, R. (2020). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan ump terhadap ipm di indonesia tahun 2014-2018. *INOVASI*. 16(2), 241-249.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*. 22(1), 3-42.
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *JEJAK*. 4(2), 102-113.
- Muliza., T. Z., & Seftarita, C. (2017). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan PDRB Terhadap IPM Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. 3(1), 51-69.
- Ningrum. J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *JIEI*. 6(2), 212-222
- Nugraeni, A. R., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. 1(2), 1-15.
- Oktavilia., S., Dita, W. P., Firmansyah., & Sugiyanto, F. X. (2018). The Relationship Between Environmental Degradation, Poverty and Human Quality in Indonesia.
- Pramono, A. Y., & Soesilowati, E. (2016). Determinan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. 5(3), 269-277.
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Return and Long-Run Growth". *Journal of Political Economy*. 94(5), 100-237.
- Rusdarti., & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*. 9(1), 1-9.
- Sidabutar, S., Purba, E., & Panjitan, P. D. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 2(2), 86-101.
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomu Di Indonesia. *Sosio Informa*. 2(1), 89-101.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report (HDR) 1990*. New York: Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report (HDR) 2020*. New York: Oxford University Press.
- World Bank. (2020). Indonesia Public Expenditure Review: Spending For Better Result.
- Zuhairoh, Z. A., & Melaniani, S. (2018). Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka

Partisipasi Murni, Rasio
Ketergantungan Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia Provinsi Jawa

Timur. Jurnal Biometrika dan
Kependudukan. 7(1), 87:95.